

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP KINERJA KEUANGAN**
(Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2009)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

EKOWATI DYAH LESTARI
NIM. C2C306017

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ekowati Dyah Lestari
Nomor Induk Mahasiswa : C2C306017
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2009)**

Dosen Pembimbing : Dul Muid, SE., M.Si., Akt.

Semarang, Juli 2011

Dosen Pembimbing



Dul Muid, SE., M.Si., Akt.

NIP. 196505131994031002

PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ekowati Dyah Lestari

Nomor Induk Mahasiswa : C2C306017

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2009)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal *19 Agustus*2011

Tim Penguji :

1. Dul Muid, SE., M.Si., Akt. ()

2. Puji Harto, S.E., M.Si., Akt. ()

3. Indira Januarti, S.E., M.Si., Akt. ()

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ekowati Dyah Lestari, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2009)”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan atau tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan universitas batal saya terima.

Semarang, Juli 2010

Yang membuat pernyataan,



Ekowati Dyah Lestari
NIM. C2C306017

ABSTRAK

Penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good corporate governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pengaruh aktivitas dewan komisaris, dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder (yaitu data yang didapat secara tidak langsung). Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* (dimana sampel digunakan apabila memenuhi kriteria yang ditentukan). Jumlah bank yang dijadikan sampel sesuai dengan kriteria ada 19 bank selama tahun 2007-2009. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Dari hasil analisis diperoleh hasil bahwa aktivitas dewan komisaris dan komite audit berpengaruh positif, sedangkan dewan direksi dan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam rangka meningkatkan profitabilitas perusahaan. Diharapkan manajemen perusahaan mampu menjalankan GCG secara lebih baik dan konsisten, sehingga skor GCG akan tinggi dan mengakibatkan tingkat profitabilitas perusahaan yang tinggi.

Kata Kunci: Aktivitas Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kinerja Keuangan

ABSTRACT

Implementation and management of corporate governance is good or better known as good corporate governance is a concept that emphasizes the importance of shareholder rights to obtain information with true, accurate, and timely. In this study, the issues to be discussed is how to influence the activity of the board of commissioners, board of directors, board of independent commissioners and audit committees on financial performance.

The research was conducted using secondary data (ie, data obtained indirectly). Sampling was done by purposive sampling (where samples are used if they meet specified criteria). The number of banks sampled in accordance with the criteria there are 19 banks during the years 2007-2009. The method of analysis used is multiple linear regression.

From the analysis obtained results that the activities of the board and audit committee have a positive, while the board of directors and board of commissioners of independent have negative effect on financial performance. The information obtained from the results of this study is expected to be used as an essential factor in the decision-making process in order to improve the profitability of the business. It is expected that the management of the company is capable of running the GCG best and consistent, so that the score will be high and the outcome of GCG profitability of high level of the company.

Keywords: activities of the board of commissioners, board of directors, board of commissioners of independent audit committee, financial performance

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2009)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Karena itu, dari hati yang paling dalam, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan penulis kepada orang-orang berikut, atas sumbangsih mereka:

1. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si, Akt. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Drs. H. Mudji Rahardjo, SU selaku Ketua Pengelola Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
3. Bapak Drs. Soedarno, M.Si, Akt., Ph.D. selaku Koordinator Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
4. Bapak Dul Muid, SE, M.Si, Akt. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dorongan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
5. Bapak Drs. H. Idjang Soetikno, MM, Akt. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bantuan dan saran selama masa perkuliahan.

6. Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas ilmu dan wawasan yang diberikan.
7. Keluarga besar penulis atas doa dan supportnya.
8. Sahabat Penulis atas keceriaan dan semangat yang diberikan.
9. Tak lupa terima kasih penulis ucapkan bagi semua pihak yang tidak dapat penulis ungkapkan satu per satu.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kelanjutan pembuatan penelitian ini. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya akan mampu memberikan sumbangsih sekecil apapun untuk diterapkan baik dalam praktek maupun untuk penelitian selanjutnya.

Semarang, Juli 2011

Ekowati Dyah Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	8
2.1.2 <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	10
2.1.3 Kinerja Keuangan.....	14
2.1.4 Dewan Komisaris.....	16
2.1.5 Dewan Direksi.....	18
2.1.6 Komisaris Independen.....	20
2.1.6 Komite Audit.....	22

2.2 Penelitian Terdahulu.....	24
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	25
2.3 Perumusan Hipotesis	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data	27
3.2 Populasi dan Sampel.....	27
3.3 Metode Pengumpulan Data	28
3.4 Definisi Operasional Variabel	28
3.5 Teknik Analisis Data	31
3.5.1 Pengujian Asumsi Klasik.....	31
3.5.1.1 Uji Normalitas	31
3.5.1.2 Uji Multikolinieritas.....	33
3.5.1.3 Uji Heterokedastisitas.....	33
3.5.1.4 Uji Autokorelasi.....	34
3.5.2 Analisis Regresi Berganda.....	35
3.5.3 Pengujian Hipotesis	36
3.5.3.1 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	36
3.5.3.2 Uji F.....	37
3.5.3.3 Uji t.....	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	38
4.2 Analisa Data	40
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	40
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	42
4.3.2.1 Uji Normalitas	43
4.3.2.2 Uji Multikolinieritas.....	45
4.3.2.3 Uji Autokorelasi.....	46
4.3.2.4 Uji Heterokedastisitas.....	48

4.2.3 Analisis Regresi Berganda.....	49
4.2.3.1 Hasil Koefisien Determinasi (R^2).....	49
4.3.4.2 Hasil Uji F	50
4.3.4.3 Hasil Uji - t	51
4.3.4.4 Pengujian Hipotesis	53
4.3 Pembahasan	55

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	25
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	43
Gambar 4.2 Grafik Normal <i>Probability Plot</i>	44
Gambar 4.3 Hasil Uji Durbin-Watson.....	47
Gambar 4.4 Grafik <i>Scatter Plot</i>	48

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 4.1	Sampel Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2007-2009.....	39
Tabel 4.2	Hasil Analisis Deskriptif	40
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas.....	44
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinieritas.....	45
Tabel 4.5	Hasil Uji Durbin-Watson.....	47
Tabel 4.6	HASil Perhitungan Koefisien Determinasi (R^2)	49
Tabel 4.7	Hasil Uji F	50
Tabel 4.8	Output Persamaan Regresi	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengungkapan informasi secara terbuka mengenai perusahaan sangatlah penting bagi perusahaan publik. Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen perusahaan kepada *stakeholders*. Keterbukaan informasi dari perusahaan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi *stakeholders* dalam pengambilan keputusan (Almilia dan Retrinasari, 2007).

Penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good corporate governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang *good corporate governance* (GCG) bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Tjager, 2003 dalam Darmawati 2004).

Corporate governanace merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Darmawati et al., 2004).

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam paradigma ini, Dewan Komisaris berada pada posisi untuk memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham, yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Demikian juga Komite Audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance*.

Pada umumnya kelangsungan hidup suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan tersebut. Dalam banyak kasus, terjadinya skandal bisnis maupun ambruknya korporasi di belahan dunia manapun terbukti ada kaitannya dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip-prinsip GCG yang bersifat universal tidak diterapkan secara murni, konsekuen dan konsisten (Sugiarsono, 2009).

Penerapan *good corporate governance* juga menjadi permasalahan yang penting dalam dunia perbankan. Semenjak krisis keuangan yang melanda Indonesia tahun 1997 telah menghancurkan berbagai sendi perekonomian salah satunya perbankan yang mengakibatkan krisis perbankan terparah dalam sejarah perbankan nasional yang menyebabkan penurunan kinerja perbankan nasional.

Melihat kondisi bermasalah tersebut, pemerintah menjalankan kebijakan reformasi perbankan pada Maret 1999 dengan melakukan penutupan bank, pengambilalihan 7 bank, rekapitulasi 9 bank, dan menginstruksikan 73 bank untuk mempertahankan operasinya tanpa melakukan rekapitulasi sehingga pada tahun 2001 jumlah bank yang tersisa sebanyak 151 bank. Selain melaksanakan kebijakan reformasi perbankan, pada tahun 2004 pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) melakukan pembenahan fundamental terhadap perbankan nasional yaitu dengan dikeluarkannya API (Arsitektur Perbankan Indonesia).

Corporate governance pada industri perbankan di negara berkembang seperti halnya Indonesia pada pasca krisis keuangan menjadi semakin penting mengingat beberapa hal. Pertama, bank menduduki posisi dominan dalam sistem ekonomi, khususnya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi (King dan Levine, 1993). Kedua, di negara yang ditandai oleh pasar modal yang belum berkembang, bank berperan utama bagi sumber pembiayaan perusahaan. Ketiga, bank merupakan lembaga pokok dalam mobilisasi simpanan nasional. Keempat, liberalisasi sistem perbankan baik melalui privatisasi maupun deregulasi ekonomi menyebabkan manajer bank memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menjalankan operasi bank (Arun, Turner, 2003 dalam Supriyatno 2006).

Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan (Kieso dan

Weygandt, 1995), sehingga laba yang tinggi belum tentu mencerminkan kas yang besar. Dalam hal ini arus kas mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan di masa mendatang. Arus kas (*Cash Flow*) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai dan benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan (Pradhono, 2004).

Dalam melaksanakan *corporate governance*, dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan. Fungsi dari dewan komisaris adalah sebagai suatu sistem yang mengawasi mekanisme manajemen, dan memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan sehingga dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan (Egon Zehnder International, 2000). Terdapat tiga elemen penting yang akan mempengaruhi tingkat efektifitas dewan komisaris, yaitu independensi, aktivitas dan remunerasi. Independensi akan timbul dengan adanya komisaris independen dalam perusahaan. Peran dari dewan komisaris perusahaan menjadi lebih penting semenjak adanya krisis moneter. Kinerja yang menurun, dewan komisaris seharusnya menjadi lebih aktif untuk mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan. Menurut Fama dan Jensen (1983) secara umum menyatakan bahwa peran penting dewan direksi adalah dalam mengawasi dan memonitor manajer.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulisan skripsi ini diberi judul **“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2009)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Corporate governanace merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya agar perbankan dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan efisien.

Dalam penelitian ini akan menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kinerja keuangan dengan *research question* sebagai berikut :

1. Bagaimana aktivitas dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Bagaimana dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Bagaimana dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
4. Bagaimana komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan.

4. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan, sebagai bahan masukan dan informasi tambahan mengenai pentingnya penerapan dan pengungkapan *corporate governance*.
2. Bagi calon investor, sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi pada perusahaan yang telah menerapkan GCG.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai acuan untuk mengembangkan pengungkapan *corporate governance* secara lebih luas, khususnya pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan akan diuraikan secara garis besar isi dari setiap bab, agar dapat memberikan sedikit gambaran mengenai isi skripsi ini diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang memperkuat penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ketiga akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Sub bab dari metode penelitian ini adalah variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang membahas mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data serta pembahasan hasil penelitian dan interpretasi hasil

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan yang ada dalam penelitian, dan saran-saran perbaikan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi (*agency theory*) merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami *corporate governance*. Hal yang dibahas dalam teori ini adalah hubungan antara prinsipal (pemilik dan pemegang saham) dan agen (manajemen). Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara prinsipal dan agen (Jensen and Meckling, 1976). Inti dari hubungan keagenan adalah terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Prinsipal akan menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan serta mendelegasikan kebijakan pembuatan keputusan kepada agen. Prinsipal memiliki harapan bahwa agen akan menghasilkan *return* dari uang yang mereka investasikan. Di lain pihak, agen memiliki kewajiban untuk mengelola perusahaan sesuai dengan keinginan prinsipal. Sebagai wujud dari akuntabilitas manajemen kepada pemilik, setiap periode manajemen memberikan laporan mengenai informasi perusahaan kepada pemiliknya.

Dalam teori agensi, diasumsikan bahwa masing-masing individu cenderung untuk mementingkan diri sendiri. Hal ini menimbulkan adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan mereka sedangkan agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. Konflik akan

terus meningkat karena prinsipal tidak dapat mengawasi aktivitas agen sehari-hari untuk memastikan bahwa agen telah bekerja sesuai dengan keinginan dari prinsipal. Salah satu cara untuk mengurangi konflik antara agen dan prinsipal ini adalah melalui pengungkapan informasi oleh manajemen (agen), dimana sejalan dengan berkembangnya isu mengenai *corporate governance*. Dengan demikian, diharapkan agen dapat bekerja memenuhi permintaan dari prinsipal. Hal ini akan meningkatkan perhatian terhadap masalah pengungkapan pada aspek *corporate governance* suatu perusahaan.

Ada tiga asumsi yang melandasi teori keagenan (Darmawati, dkk, 2005) yaitu:

1. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasional (*bounded rationality*) dan tidak menyukai resiko
2. Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetri informasi antara principal dan agent
3. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai komoditi yang dapat dijualbelikan

Corporate governance sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian

hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni, Khomsiyah dan Rika, 2004).

2.1.2 Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan (Monks & Minow, 2002 dalam Wardhani, 2006). *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Di kalangan pebisnis, secara umum, GCG diartikan sebagai tata kelola perusahaan. *Good corporate governance* (GCG) diartikan pula sebagai system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder (Monks, 2003 dalam Kaihatu, 2006). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

Tujuan dari *corporate governance* untuk menciptakan pertambahan nilai bagi pihak pemegang kepentingan. Mekanisme *corporate governance* yang baik dan proporsi kepemilikan serta proporsi *board of directors* yang relatif seimbang akan dapat menciptakan *good corporate governance* (Sunarto, 2003 dalam Almilia dan Ikka, 2007). Sunarto (2003) dalam Almilia dan Ikka (2007) juga menyatakan apabila *good corporate governance* tercapai maka kinerja saham perusahaan tersebut akan semakin meningkat. Menurut Daniri (2001) dalam Wignjohartojo (2001) *corporate governance* itu penting karena dapat (1) melancarkan akses pendanaan, (2) perlindungan direksi atau manajemen terhadap gugatan hukum, (3) meningkatkan efisiensi di dalam pengambilan keputusan, (4) meningkatkan kepercayaan publik, (5) mengurangi KKN: peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance*, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Konsep *good corporate governance* baru populer di Asia. Konsep ini relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep *good corporate governance* baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999.

Pemenuhan kepentingan seluruh *stakeholders* secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing dalam suatu perusahaan, merupakan tujuan utama yang hendak dicapai. Prinsip-prinsip utama dari *good corporate governance* yang menjadi indikator, sebagaimana ditawarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) adalah:

1. *Fairness* (Keadilan)

Prinsip keadilan (*fairness*) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan yang diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan perilaku insider. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2. *Disclosure/Transparency* (Keterbukaan/Transparansi)

Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan system pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

4. *Responsibility* (Responsibilitas)

Responsibility (responsibilitas) adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang sehat.

5. *Independency* (Independen)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen

diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komisaris, komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem governance dalam sebuah organisasi (Walsd dan Seward, 1990 dalam Arifin, 2005). Untuk meminimalkan konflik kepentingan antara principal dan agent akibat adanya pemisahan pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu cara efektif untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan tersebut. Menurut Boediono (2005), mekanisme *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah keagenan.

2.1.3 Kinerja Keuangan

Manajemen laba dilakukan oleh manajer pada faktor-faktor fundamental perusahaan, yaitu dengan intervensi pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan akuntansi akrual. Padahal kinerja fundamental perusahaan tersebut

digunakan oleh pemodal untuk menilai prospek perusahaan, yang tercermin pada kinerja saham. Manajemen laba yang dilakukan manajer pada laporan keuangan tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerja saham (Haris, 2004).

Bryshaw dan Eldin (1989) menemukan bukti bahwa alasan manajemen melakukan manajemen laba adalah: (1) skema kompensasi manajemen yang dihubungkan dengan kinerja perusahaan yang disajikan dalam laba akuntansi yang dilaporkan; serta (2) fluktuasi dalam kinerja manajemen dapat mengakibatkan intervensi pemilik untuk mengganti manajemen dengan pengambilalihan secara langsung. Cornett et al., (2006) menemukan adanya pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap penurunan *discretionary accruals* sebagai ukuran dari manajemen laba dan berhubungan positif dengan CFROA. Hasil ini diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa CFROA merupakan fungsi positif dari indikator mekanisme *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* dapat mengurangi dorongan manajer melakukan *earnings management*, sehingga CFROA yang dilaporkan merefleksikan keadaan yang sebenarnya.

Performance atau kinerja merupakan suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diukur dengan mendasarkan pada suatu perbandingan dengan berbagai standar. Kinerja adalah pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan suatu metode atau pendekatan.

Pengukuran kinerja perusahaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran kinerja non keuangan (*non financial performance measurement*) dan pengukuran kinerja keuangan (*financial performance measurement*) (Morse dan Davis, 1996; Hirsch 1994:594-607 dalam Tugiman, 2000). Informasi yang digunakan dalam mengukur kinerja non keuangan adalah informasi yang disajikan tidak dalam satuan uang atau rupiah (*non financial information*) namun dengan satuan ukur non keuangan (Kaplan & Atkinson, 1998 dalam Bugshan, 2005). Adapun informasi yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan adalah informasi keuangan (*financial information*), yaitu informasi akuntansi manajemen dan informasi akuntansi keuangan seperti laba sebelum pajak, tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya.

2.1.4 Dewan Komisaris

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan. Yang terpenting dalam hal ini adalah kemandirian komisaris dalam pengertian bahwa Dewan Komisaris harus memiliki kemampuan untuk

membahas permasalahan tanpa campur tangan manajemen, dilengkapi dengan informasi yang memadai untuk mengambil keputusan, dan berpartisipasi secara aktif dalam penetapan agenda dan strategi. Dewan Komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Ukuran dewan komisaris menentukan tingkat keefektifan pemantauan kinerja bank. Menurut Chtourou *et al* (2001) dalam penelitiannya bahwa dengan jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Dalam komposisi ukuran dewan komisaris didalamnya terdapat komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pada teori agensi, dewan komisaris perilaku oportunistanya (Jensen dan Mecking, 1976). Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (KNKG, 2006). Akan tetapi, dewan komisaris tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam mengambil keputusan operasional. Coller dan Gregory (dalam Hadi dan Sabeni, 2002) berpendapat bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan manajemen dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif.

Penelitian Midiastuty dan Machfoedz (2003) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap indikasi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pengaruh tersebut ditunjukkan dengan tanda positif. Hal tersebut berarti makin besar ukuran dewan komisaris maka makin banyak kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan, dan pada akhirnya akan menurunkan kinerja manajemen. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah komisaris yang lebih banyak lebih mampu mengurangi indikasi kinerja manajemen daripada jumlah komisaris yang sedikit.

Jensen (1993) dan Lipton dan Lorsch (1992) dalam Beiner, Drobotz, Schmid dan Zimmermann (2003) merupakan yang pertama menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance*. Hal ini diperkuat oleh pendapat Allen dan Gale (2000) dalam Beiner et al. (2003) yang menegaskan bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme *governance* yang penting. Dalam penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Aktifitas (rapat) dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.1.5 Dewan Direksi

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Pentingnya dewan (baik dewan direksi maupun dewan komisaris) tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan baru, berapa banyak dewan yang dibutuhkan perusahaan?. Apakah dengan semakin banyak dewan berarti

perusahaan dapat meminimiliasi permasalahan agensi antara pemegang saham dengan direksi? Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependence* (Goodstein, Gautarn, Boeker, 1994). Maksud dari pandangan *resources dependence* adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik. Pfeffer & Salancik (1978) dalam Bugshan (2005) juga menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi.

Sedangkan kerugian dari jumlah dewan yang besar berkaitan dengan dua hal, yaitu: meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan dan turunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan kontrol (Yermack, 1996).

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang kecil sehingga nilai perusahaan yang memiliki dewan yang banyak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki direksi lebih sedikit (Jensen, 1993; Lipton and Lorsch, 1992; Yermack, 1996). Dalton et al., 1999) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan. Sedangkan Eisenberg et al. (1998) menyatakan bahwa ada hubungan yang negatif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan, dengan menggunakan sampel perusahaan di Finlandia. Jadi, dewan merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting dalam CG, dimana keberadaannya menentukan

kinerja perusahaan. Bukti yang menyatakan efektifitas ukuran dewan masih berbaur. Dari hasil yang masih belum konklusif tersebut dapat dikatakan bahwa pengaruh ukuran direksi terhadap kinerja perusahaan akan tergantung dari karakteristik dari masing-masing perusahaan terkait. Kaitan tersebut terutama dengan karakteristik perusahaan secara keuangan. Efektifitas direksi dalam menghasilkan kinerja akan berbeda bagi perusahaan yang sehat secara keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang sedang dalam masalah keuangan. Mengingat fungsi dewan direksi, maka penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2 : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.1.6 Komisaris Independen

Konteks independensi ini menjadi semakin kompleks dalam perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Pfeffer & Salancik (1978) menyatakan bahwa dengan semakin meningkatnya tekanan dari lingkungan perusahaan maka kebutuhan akan dukungan dari luar juga semakin meningkat. Selain itu, Daily & Dalton (1994) menyatakan bahwa apabila ada resistensi dari CEO untuk menerapkan strategi yang agresif untuk mengatasi kinerja perusahaan yang terus menurun, maka adanya direksi dari luar akan mendorong pengambilan keputusan untuk melakukan perubahan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan bahwa semakin tinggi representasi dewan dalam (*insider board*) maka keterlibatan direksi dalam pengambilan keputusan yang strategis akan semakin rendah (Judge & Zeithaml, 1992).

Veronica dan Utama (2005) meneliti pengaruh praktik *corporate governance* terhadap manajemen laba. Praktik *corporate governance* yang diteliti yaitu proporsi dewan komisaris independen. Hasil dari penelitian ini adalah kesimpulan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Boediono (2005) meneliti apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa secara parsial pengaruh *corporate governance* dalam hal ini komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Veronica dan Bachtiar (2004) menemukan bahwa variabel persentase dewan komisaris independen tidak berkorelasi secara signifikan terhadap akrual kelolaan, walau begitu interaksi antar variabel akrual kelolaan dan dewan komisaris independen menunjukkan koefisien positif yang signifikan terhadap *return* perusahaan. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan makin tingginya persentase dewan komisaris independen maka akrual kelolaan makin berpengaruh terhadap *return*.

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Dalam penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3: Ukuran dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.1.7 Komite Audit

Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. Menurut Alijoyo (2003), komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektifitas fungsi internal audit maupun eksternal audit dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Dengan demikian, hasil pengungkapan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dapat memiliki tingkat kehandalan atau reliabilitas yang tinggi. Menurut Foker (1992) dalam Said et al (2009), keberadaan komite audit dapat mengurangi biaya agensi, dan meningkatkan pengendalian internal serta meningkatkan kualitas pengungkapan.

Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu (FCGI, 2002):

1. Laporan keuangan (*financial reporting*), adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, serta rencana dan komitmen jangka panjang.
2. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*), adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan

peraturan yang berlaku, melaksanakan tugasnya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan perusahaan (*corporate control*). Tanggung jawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan system pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas system pengawasan intern.

Klein (2002) memberikan bukti secara empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan akrual diskresioner yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen. Kandungan *discretionary accruals* tersebut berkaitan dengan kualitas laba perusahaan. Price Waterhouse (1980) dalam Mc.Mullen (1996) menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komite audit dapat mengurangi aktivitas *earning management* yang selanjutnya akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang salah satunya adalah kualitas laba. Dalam penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H4 : Keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen dan komite audit terhadap kinerja keuangan. Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

Lastanti (2004) meneliti hubungan struktur *corporate governance* dengan kinerja perusahaan dan reaksi pasar. Struktur *corporate governance* diukur dengan komposisi Dewan Komisaris independen, struktur kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan institusional. Sedangkan reaksi pasar diproksi dengan nilai perusahaan (diukur dengan Tobin's Q) dan kinerja perusahaan (diukur dengan ROA dan ROE). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara independensi Dewan Komisaris dengan Tobin's Q. Sementara variabel yang lain tidak berpengaruh secara signifikan, baik terhadap nilai perusahaan maupun kinerja perusahaan.

Suranta dan Machfoedz (2003) melakukan penelitian tentang struktur kepemilikan, nilai perusahaan, investasi dan ukuran dewan direksi. Dengan menggunakan persamaan OLS, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan adalah linier dan negatif. Dengan menggunakan persamaan simultan 2SLS dan 3SLS dan memasukkan variabel kepemilikan institusional dan ukuran dewan direksi, hasil regresi menunjukkan bahwa nilai perusahaan hanya dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial, institusional dan ukuran dewan direksi.

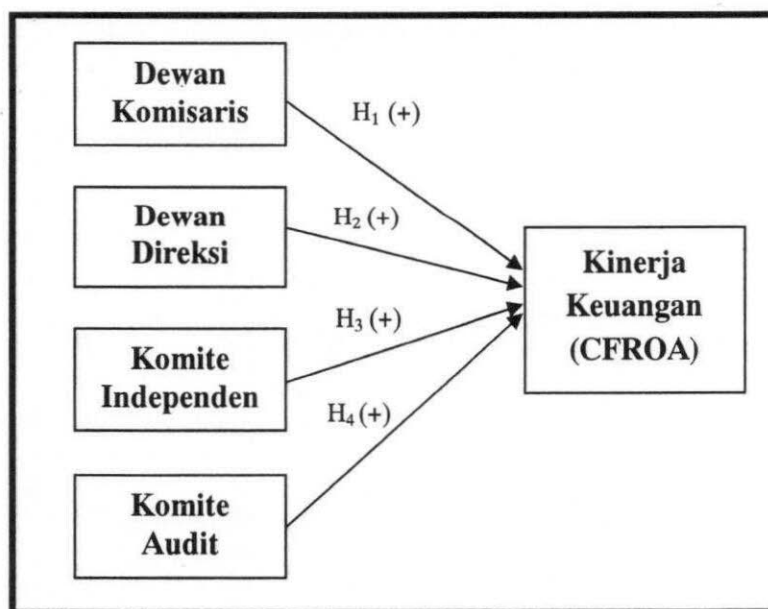
Siallagan dan Machfoedz (2006) meneliti hubungan mekanisme *corporate governance*, kualitas laba dan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, mekanisme *corporate governance* diproksi oleh kepemilikan manajerial, keberadaan komite audit dan proporsi dewan komisaris independen. Dengan menggunakan 74 sampel dan 197

observasi, hasil menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* mempengaruhi nilai perusahaan (Tobin's Q).

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dengan melihat dari dasar teori yang telah diuraikan sebelumnya dan penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor untuk mengukur kinerja keuangan. Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diukur dengan dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen dan komite audit. Sehingga kerangka pikir tersebut dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Perumusan Hipotesis

Dari uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini :

1. Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
2. Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
3. Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
4. Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank periode 2007-2009 yang dipublikasikan untuk umum serta tercantum dalam Direktori Perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Data penelitian yang mencakup data periode 2007-2009 dipandang cukup mewakili kondisi perbankan di Indonesia pada saat itu dan indikator-indikator keuangan perbankan pada periode itu.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan. Menurut Direktori Perbankan Indonesia tahun 2007-2009 jumlah bank ada 86, yang merupakan besarnya populasi dalam penelitian ini. Pemilihan populasi diambil dari bank publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang memiliki kriteria tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Sampel penelitian diambil secara *purposive sampling*, dimana sampel digunakan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan termasuk perusahaan yang sudah *go public* terdaftar di BEI mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2007-2009.
2. Data yang tersedia lengkap, baik data mengenai corporate governance perusahaan dan data yang diperlukan untuk kinerja keuangan.

Berdasarkan pada kriteria pengambilan sampel seperti yang telah disebutkan di atas, maka jumlah bank yang dijadikan sampel sesuai dengan kriteria ada 19 bank selama tahun 2007-2009.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari laporan keuangan perusahaan perbankan selama periode tahun 2007-2009¹ yang bisa dilihat dalam Laporan Publikasi Bank Indonesia, dari Direktori Perbankan Indonesia dan dipublikasikan oleh Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2007-2009, serta dari situs masing-masing perusahaan sampel.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data dokumentasi yaitu data sekunder yang berupa anual report bank yang go publik dan yang dipublikasikan. Data laporan keuangan data cross section dari semua jenis bank yang diambil dan data time series untuk tahun 2007-2009.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan cara pengukuran dari masing-masing variabel

tersebut. Pengertian dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Aktifitas Dewan Komisaris

Aktifitas dewan komisaris merupakan jumlah rapat dewan komisaris perusahaan (Beiner et al, 2003). Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan manajemen, dan memberikan nasehat kepada manajemen jika dipandang perlu oleh dewan komisaris (KNKG, 2004). Aktifitas dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah rapat dewan komisaris suatu perusahaan.

2. Dewan Direksi

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Jumlah anggota direksi disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat serta bertindak independen. Dewan Direksi diukur dengan jumlah anggota Dewan Direksi.

3. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2004). Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan

indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.

4. Komite Audit

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit.

5. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data yang berasal dari laporan keuangan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *cash flow return on asset* (CFROA). CFROA dihitung dari laba sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dibagi dengan total aktiva.

$$CFROA = \frac{EBIT + Dep}{Assets}$$

Dimana: CFROA = Cash Flow Return on Assets

EBIT = Laba Sebelum Bunga dan Pajak

Dep = Depresiasi

Assets = Total Aktiva

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang digunakan yaitu: uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.5.1.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji ini dilakukan dengan cara melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal atau grafik. Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2006). Pengujian normalitas ini dapat dilakukan melalui analisis grafik dan analisis statistik.

1. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat membingungkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat *normal*

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari analisis *normal probability plot* adalah sebagai berikut:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Analisis Statistik

Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan pula melalui analisis statistik yang salah satunya dapat dilihat melalui *Kolmogorov-Smirnov test* (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 = Data residual terdistribusi normal

H_a = Data residual tidak terdistribusi normal

Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut:

- a. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan secara statistik maka H_0 ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal.
- b. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S tidak signifikan statistik maka H_0 diterima, yang berarti data terdistribusi normal.

Pedoman pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :

- a) Nilai sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$ distribusi adalah tidak normal

- b) Nilai sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ distribusi adalah normal

3.5.1.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2006) uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi kolerasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model ini adalah sebagai berikut :

- a) Nilai R² sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
- b) Menganalisa matrik korelasi antar variabel bebas jika terdapat korelasi antar variabel bebas yang cukup tinggi ($> 0,9$) hal ini merupakan indikasi adanya multikolenaritas
- c) Dilihat dari nilai VIF dan Tolerance. Nilai *cut off* Tolerance < 0.10 dan VIF > 10 (berarti terdapat multikolinieritas)

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi

heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser.

Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser dilakukan sebagai berikut:

1. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi signifikan statistik, yang berarti data empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas.
2. Apabila probabilitas nilai test tidak signifikan statistik, maka berarti data empiris yang diestimasi tidak terdapat heteroskedastisitas.

3.5.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan uji statistik melalui uji Durbin-Watson (DW test) (Ghozali, 2006).

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau *upper bound* (du) dan ($4-du$) maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* (dl) maka koefisien autokorelasi > 0 , berarti ada autokorelasi positif.

3. Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasi < 0 , berarti ada autokorelasi negatif.
4. Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3.5.2 Analisis Regresi Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Hal ini dikarenakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini jumlahnya lebih dari satu. Persamaan regresi pada penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

dimana:

Y	=	CFROA
a	=	konstanta
X ₁	=	Dewan Komisaris
X ₂	=	Dewan Direksi
X ₃	=	Komisaris Independen
X ₄	=	Komite Audit
b ₁ , ..., b ₄	=	Koefisien regresi
e	=	error term

Nilai koefisien regresi disini sangat menentukan sebagai dasar analisis, mengingat penelitian ini bersifat *fundamental method*. Hal ini berarti jika koefisien b bernilai positif (+) maka dapat dikatakan terjadi pengaruh searah antara variabel independen dengan variabel dependen, setiap kenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan kenaikan variabel dependen. Demikian pula sebaliknya, bila koefisien nilai b bernilai negatif (-), hal ini menunjukkan

adanya pengaruh negatif dimana kenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan penurunan nilai variabel dependen.

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit* nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik F, nilai koefisien determinansi (R^2) dan statistik t. Pengujian hipotesis tersebut sebagai berikut:

3.5.3.1 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dicari dengan rumus (Gujarati, 1995):

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum Y_i^2}$$

Nilai koefisien determinansi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2006). Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.5.3.2 Uji F

Uji F dilakukan dengan menguji secara serempak (simultan) apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel.

1. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$, variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$, variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.3.3 Uji t

Untuk menguji hipotesis, digunakan uji t untuk menguji signifikansi pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen dan komite audit terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu uji t ini digunakan untuk menguji hipotesis H_{a1} , H_{a2} , H_{a3} dan H_{a4} . Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

H_a ditolak apabila $Sig\ t > \text{tingkat signifikansi } \alpha (0,05)$

H_a diterima apabila $Sig\ t < \text{tingkat signifikansi } \alpha (0,05)$